ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi negara sebagai dasar hukum. Konstitusi negara berisi kesepakatan rakyat akan ideologi negara, cita – cita dan tujuan negara. Untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan negara dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, namun dengan adanya kecenderungan praktek korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara akan menghambat terwujudnya cita – cita dan tujuan negara. Hal ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang diamanatkan konstitusi memiliki urgensinya dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara tersebut. Dengan demikian, sejauhmana peran dan fungsi serta upaya yang dilakukan BPK dan hambatan yang dihadapinya akan secara signifikan mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kuangan negara.

Penulisan Hukum ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan tujuan untuk mengetahui peran dan fungsi BPK serta upaya yang dilakukan maupun hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPK memiliki peran dan fungsi dalam menilai dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, melalui pengawasan yang berupa pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Upaya BPK dilakukan dengan menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, melalui upaya secara yuridis dan non yuridis. Upaya BPK ini pun mengalami hambatan baik secara yuridis maupun non yuridis. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan – perbaikan peraturan perundang – undangan yang bersinggungan dengan ruang lingkup kewenangan BPK serta peningkatan reformasi birokrasi dalam kelembagaan BPK.

Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Akuntabilitas, Keuangan Negara.

ABSTRACT

The State of Indonesia is legal state based on the state constitution of the as the legal basis for. The state constitution of the contains an general agreement about ideology of nation, ideals of the state, and the purpose of the state. To realize ideals of the state and the purpose of the state needed good governance, especially as regards financial management of the state, but with tendency of the practice of corruption and abuse of the state financial will impede realization of ideals state and the purpose of the state. Its happened because a lack of accountability state financial management and BPK as an institution respond financial monitoring the state of being mandated the constitution having urgency in improving financial acountability the state. Thus, about the role and function and the efforts made by BPK and obstacles faced is going to significant to affect enhancing accountability state financial.

Writing this law used the socio legal with a view to know the role and function of BPK and the efforts made by and obstacles facing in developing accountability financial of the state. This study concluded that BPK having the role and function in assessing and to improving accountability state financial, through supervision of the state financial management audit. Efforts BPK done with creates an environment financial management the state of being accountabel, through the effort in a juridical manner and non juridical. BPK efforts also experienced obstacles in a juridical manner and non juridical. Therefore need to improvements statutory regulations that intersect with space scope of the authority of BPK and improve institutional bureaucracy reform in BPK.

Keywords : Audit Agency, BPK, Accountability, State Financial.